FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EKSISTENSI BMT/BTM DI PEKALONGAN

Kuat Ismanto

kuatismanto79@gmail.com

Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Pekalongan Jl. Kusumabangsa No. 9 Pekalongan, Jawa Tengah 51114

ABSTRAK

TUJUAN TULISAN INI ADALAH MENGKAJI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EKSISTENSI BMT/BMT DI PEKALONGAN. YANG DIMAKSUD EKSISTENSI ADALAH KEMAMPUAN LEMBAGA TERSEBUT UNTUK TETAP BEROPERASI SECARA SEHAT. FAKTOR-FAKTOR YANG DIJADIKAN VARIABEL PENGARUH DIANTARANYA REGULASI, SUPERVISI, KAPASITAS LEMBAGA, DAN KONDISI MAKRO EKONOMI. DATA DIPEROLEH MELALUI PENYEBARAN KUESIONER KE PENGELOLA BMT/BTM. ANALISIS DATA MENGGUNAKAN REGRESI DENGAN BANTUAN PROGRAM SPSS. HASIL PENELITIAN MENYIMPULKAN BAHWA BERDASAR HASIL UJI F, VARIABEL INDEPENDEN TIDAK BERPENGARUH SECARA SIMULTAN TERHADAP EKSISTENSI BMT/BTM. DARI HASIL UJI PARSIAL MENUNJUKKAN BAHWA SELURUH VARIABEL TIDAK BERPENGARUH TERHADAP EKSISTENSI BMT/BTM DI PEKALONGAN. DISAMPING ITU, KOEFISIEN DETERMINASI YANG DIPEROLEH JUGA KECIL.

Kata Kunci: Eksistensi BMT/BTM; Regulasi; Supervisi; Kapasistas Lembaga, Kondisi makro ekonomi.

Pendahuluan

Baitulmal wa Tamwil (BMT) dan Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) telah menjadi istilah populer lembaga keuangan mikro berbasis syariah. Keberadaannya, menjadi alternatif akses pembiayaan, yang tidak ditangani oleh lembaga keuangan lainnya, seperti bank. Oleh karena itu, lini bisnis BMT/BTM pada pembiayaan sektor usaha mikro dan kecil. Eksistensinya juga telah membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ada banyak hal yang telah dilakukan BMT/BTM untuk bertahan hidup. Ragamnya kebutuhan pembiayaan masyarakat menuntut BMT/BTM untuk inovatif dalam membuat produk, sehingga bisa bertahan hidup. Disamping itu, BMT/BTM bekerja keras untuk memenuhi aspek syariah (syariah compliance). Ia juga mempertimbangkan aspek ekononomi sebagai sebuah lembaga bisnis. Meski demikian, lembaga yang ada tidak memiliki manajemen resiko yang mumpuni (Hafidz, dkk., 2011).

Dalam operasionalnya di lapangan, BMT/BTM mengalami kendala untuk berkembang dan berkelanjutan. Ada BMT yang telah ditutup, dilakukan penarikan (penutupan) kantor cabang, *mis management* (salah kelola), seperti pada BMT Arta Amanah Pekalongan. Sementara di tempat lain, BMT bermasalah di Daerah Istimewa



Yogyakarta sekitar 10% dari jumlah BMT yang ada. Permasalahan ini menyebabkan kerugian sebesar Rp. 140 miliar. (http://www.republika.co.id diunduh 20 September 2014).

Ada banyak faktor yang mempengaruhi keberlangsungan BMT/BTM di Indonesia. Yang dimaksud keberlangsungan BMT/BTM adalah kemampuan lembaga untuk tetap hidup dan mampu melayani masyarakat dengan baik. *Pertama*, adalah faktor regulasi dan supervisi. Hasil penelitian Staschen (1999), Bank Indonesia (2000), Asian Development Bank (2001) menunjukkan bahwa dua faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan lembaga keuangan mikro. Regulasi akan mengatur bahwa lembaga yang ada akan tetap patuh pada aturan yang telah ditetapkan pihak yang berwenang. Supervisi bertindak memastikan bahwa pelaksanaan di lapangan sesuai dengan regulasi.

Kedua, faktor yang mempengaruhi eksistensi adalah kapasitas lembaga. Kapasistas lelmbaga akan melihat seberapa besar permodalan dan juga jumlah kantor cabang. Menurut Galor (2005) bahwa kapasitas lembaga dapat ditingkatkan melalui permodalan yang melibatkan partisipasi anggota dalam penghimpunan dana. Morshed (2004) menyatakan bahwa permodalan dan penguatan kapasitas lembaga merupakan dua hal yang sama pentingnya. Kajian yang dilakukan Abdul Qayyum dan Munir Ahmad (2006) tentang "Efficiency and Sustainability of Micro Finance Institutions in South Asia" menyatakan bahwa lembaga keuangan mikro akan tetap sustainable jika mereka memiliki lebih dari 10.000 peminjam aktif.

Faktor lain yang tidak kalah pengaruhnya adalah kondisi makro ekonomi. Hasil penelitian Asian Development Bank (2000) memperlihatkan bahwa salah satu faktor penentu dalam pengembangan keuangan mikro adalah stabilitas kebijakan ekonomi makro, terutama yang berkaitan dengan kestabilan harga-harga, pertumbuhan ekonomi, dan infrastruktur fisik pedesaan. Namun demikian, Abdul Salam (2007) berpendapat bahwa tingkat sustainabilitas koperasi simpan pinjam tidak dipengaruhi secara langsung oleh kondisi perekonomian makro. Koperasi simpan pinjam masih tetap berfungsi, meskipun keadaan ekonomi negara menurun dan terjadi krisis ekonomi.

Eksistensi BMT/BTM di Pekalongan harus tetap berlangsung. Keberadaannya adalah sebuah keniscayaan untuk menopang keberlanjutan ekonomi mikro, terutama para perajin batik. Untuk itu, tulisan ini mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi eksistensi BMT/BTM di Pekalongan. Adapun variabel independen yang dijadikan sebagai pengukur adalah faktor regulasi, supervisi, kapasitas lembaga, dan kondisi makro ekonomi.

Rumusan Masalah

Atas dasar uraian diatas, dirumuskan pertanyaan penelitian apakah faktor regulasi, supervisi, kapasitas lembaga, dan kondisi makro ekonomi mempengaruhi baik



secara parsial maupun simultan, eksistensi BMT/BTM. Hal ini penting dilakukan karena jika dibandingkan dengan lembaga keungan mikro lainnya, BMT/BTM merupakan bentuk yang paling ideal dengan misi komersial (bait at-tamwil) dan misi sosialnya (bait al-maal) sebagai sumber pendanaan bagi usaha mikro masyarakat muslim Indonesia. Selain itu, BMT/BTM merupakan bentuk koperasi simpan pinjam yang berlandaskan pada syariah yang merupakan lembaga milik bersama yang berdasarkan keanggotaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

Kajian Riset Terdahulu dan Teori

1. Variabel dan Indikator

Ada satu variabel terikat (dependent variable) dan empat variabel bebas (independent variable) dalam penelitian ini. Variabel terikat berupa eksistensi BMT/BTM, dan variabel bebas terdiri dari regulasi, supervisi, kapasistas lembaga, dan kondisi makro ekonomi. Pertama, eksistensi BMT/BTM. Eksistensi BMT/BTM adalah kemampuan lembaga keuangan syariah untuk beroperasi secara terus menerus. Eksistensi BMT/BTM diukur dengan indikator permodalan, kualitas aktiva, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian, prinsip syariah. Kedua, regulasi. Regulasi adalah aturan yang dikeluarkan oleh pihak berwenang yang digunakan untuk mengatur BMT/BTM. Aturan itu baik berupa Undang-undang ataupun peraturan terkait dengan kepatuhan syariah (syariah compliance). Indikator regulasi berupa keberadaan UU dan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Ketiga, supervisi. Supervisi adalah melakukan pengamatan secara langsung dan berkala oleh atasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan untuk kemudian apabila ditemukan masalah, segera diberikan petunjuk atau bantuan yang bersifat langsung guna mengatasinya. Variabel supervisi diukur dengan frekuensi supervisi oleh Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) dan supervisi kesyariahan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Keempat, kapasista lembaga. Kapasitas lembaga atau dengan bahasa lain ukuran perusahaan adalah suatu skala, dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain. Variabel kapasitas lembaga diukur dengan jumlah cabang, jumlah SDM/I, dan jumlah produk yang ditawarkan. Kelima, kondisi makro ekonomi. Kondisi makro ekonomi didefinisikan sebagai suatu sistem yang menjelaskan tentang ekonomi di Indonesia yang membawa pengaruh besar terhadap masyarakat, pasar, dan juga perusahaan. Sistem yang melakukan analisa mengenai segala bentuk perubahaan kondisi ekonomi Indonesia untuk mencapai hasil analisa terbaik. Bentuk perubahaan ekonomi yang dimaksud di sini meliputi tentang pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, dan kestabilitasan harga, serta kesimbangan tercapai atau tidaknya neraca dilakukan yang berkesinambungan. Variabel kondisi makro ekonomi diukur dengan tingkat inflasi, tingkat suku bunga BI, dan kurs rupiah.

2. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang keberlangsungan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) telah banyak dilakukan oleh para peneliti yang difokuskan pada tiga pokok bahasan. *Pertama*, penelitian yang difokuskan pada aspek-aspek regulasi dan supervisi dari Koperasi Simpan Pinjam (konvensional) atau Lembaga Keuangan Mikro (Staschen, 1999; Bank Indonesia, 2000; Asian Development Bank, 2001). Staschen melihat bahwa regulasi dan supervisi diperlukan untuk menjamin bahwa operasionalisasi Lembaga Keuangan Mikro dapat berjalan lancar, sehingga akan menguntungkan kedua belah pihak (lembaga dan nasabahnya). Sementara, Bank Indonesia memandang bahwa pentingnya regulasi dan supervisi lembaga keuangan mikro adalah untuk melindungi nasabah dan menghindarkan adanya *moral hazard* karena adanya perbedaan kepentingan antara nasabah dan lembaga keuangan mikro.

Kedua, penelitian yang melihat bahwa keberadaan koperasi simpan pinjam (konvensional) sangat ditentukan oleh aspek pengelolaan yang mencakup dukungan sumber daya manusia (SDM), pelayanan, dan produk inovatif (Siebel, 1999). Penelitian Siebel menjelaskan bahwa lembaga keuangan mikro yang dikelola secara baik sehingga dapat melaksanakan kegiatannya secara berkesinambungan. Dengan bahasa lain, ia mengatakan bahwa sustainabilitas lembaga keuangan mikro adalah kondisi lembaga keuangan mikro yang dalam kegiatannya dapat mencukupi biaya operasi dan biaya-biaya jangka panjang.

Ketiga, penelitian yang lebih menekankan pada kinerja keuangan dan penyelenggaraan Koperasi Simpan Pinjam yang berkenaan dengan pertumbuhan aset, profitabilitas, dan kualitas aktiva (Martowijoyo, 2001; Arsyad, 2005). Penelitian Martowijoyo (2001) menyatakan bahwa faktor eksogen yang mempengaruhi Lembaga Keuangan Pedesaan (LKP) antara lain adalah adanya hubungan sosial yang menggambarkan tingkat keintiman hubungan antara lembaga dengan anggotanya. Sementara, Galor (2005) melihat bahwa model pemberdayaan yang efektif terhadap Koperasi Simpan Pinjam adalah dengan memperkuat permodalan melalui partisipasi anggota dalam penghimpunan dana. Senada dengan Morshed (2004) menyatakan bahwa pada lembaga keuangan mikro antara penguatan permodalan dan penguatan kapasitas lembaga merupakan dua hal yang sama pentingnya.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Abdul Qayyum dan Munir Ahmad tentang "Efficiency and Sustainability of Micro Finance Institutions in South Asia" menyatakan bahwa Lembaga Keuangan Mikro akan tetap sustainable jika mereka memiliki lebih dari 10.000 peminjam aktif. Penelitian mereka menyimpulkan bahwa banyak lembaga keuangan mikro yang berada di Pakistan, Bangladesh, dan India yang tidak sustainable. Selain itu, untuk meningkatkan efisiensi perlu ada kebijakan khusus yang bisa mendorong managerial skills dan penggunaan teknologi (Qayyum and Ahmad, 2006).

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Abdul Salam (2007) tentang sustainabilitas koperasi simpan pinjam yang menekankan pada faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi sustainabilitas koperasi simpan pinjam. Keberlangsungan koperasi simpan pinjam dipengaruhi secara positif signifikan oleh faktor efektifitas regulasi dan supervisi, kapasitas kelembagaan, dan permodalan. Menurutnya, faktor regulasi dan supervisi terbukti memiliki hubungan fungsional. Demikian juga faktor kapasitas lembaga dan modal yang bersama-sama mempengaruhi sustainabilitas. Lebih lanjut, ia menilai bahwa tingkat sustainabilitas koperasi simpan pinjam tidak terpengaruh secara langsung oleh kondisi perekonomian makro. Koperasi simpan pinjam masih tetap berfungsi, meskipun keadaan ekonomi negara menurun dan terjadi krisis ekonomi.

Karya lain "Banking for the Poor: the Role of Islamic Banking in Microfinance Initiative" yang ditulis oleh Asyraf Wajdi Dusuki (2010). Penelitian yang dilakukan oleh Jay K. Rosengard't dan A. Prasetyantoko (2011) dengan judul "If the Banks are Doing so Well, Why Cannot I Get a Loan? Regulatory Constraints to Financial Inclusion in Indonesia" menyimpulkan bahwa pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang tepat agar bank dapat menemukan model yang sesuai untuk membiayai usaha kecil, mikro, dan menengah. Penelitian yang dilakukan oleh Kazunari Tsukada, Takayuki Higashikata, dan Kazushi Takashashi (2010) dengan topik "Microfinance Penetration and its Influence on Credit Choice in Indonesia: Evidence from A Household Panel Survey".

Penelitian yang dilakukan oleh *Asian Development Bank* (2000) memperlihatkan bahwa salah satu faktor penentu dalam pengembangan keuangan mikro adalah stabilitas kebijakan ekonomi makro, terutama yang berkaitan dengan kestabilan harga-harga, pertumbuhan ekonomi, dan infrastruktur fisik pedesaan. Selain itu, pengembangan lembaga keuangan mikro juga ditentukan oleh kebijakan pemerintah mulai dari kebijakan fiskal hingga kebijakan pengembangan lingkungan industri keuangan.

3. Kajian Teori

Hunbungann Variabel Regulasi dengan Eksistensi BMT/BTM

Regulasi memberi kerangka acuan dalam pengoperasian BMT/BTM. Regulasi yang jelas, akan memberi kepastian hukum bagi institusi dan juga masyarakat sebagai pengguna. Staschen (1999) melihat bahwa regulasi diperlukan untuk menjamin bahwa operasionalisasi lembaga keuangan mikro dapat berjalan lancar, sehingga akan menguntungkan kedua belah pihak. Sementara, Bank Indonesia (2000) memandang bahwa pentingnya regulasi lembaga keuangan mikro adalah untuk melindungi nasabah dan menghindari moral hazard karena adanya perbedaan kepentingan antara nasabah dan lembaga keuangan mikro. Abdul Salam (2007) juga berpendapat bahwa regulasi berpengaruh positif-signifikan terhadap kaberlangsungan keuangan mikro. Penelitian yang dilakukan

oleh Jay K. Rosengard't dan A. Prasetyantoko (2011) menyimpulkan bahwa pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang tepat.

Hubungan Variabel Supervisi dengan Eksistensi BMT/BTM

Supervisi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa institusi mematuhi regulasi yang ditetapkan. Staschen (1999) berpendapat bahwa supervisi diperlukan untuk menjamin bahwa operasionalisasi lembaga keuangan mikro dapat berjalan lancar, sehingga akan menguntungkan kedua belah pihak. Sementara, Bank Indonesia (2000) memandang bahwa pentingnya supervisi lembaga keuangan mikro untuk melindungi nasabah dan menghindari kepentingan antara nasabah dan lembaga. Hubungan ini juga didukung oleh Abdul Salam (2007) yang berpendapat bahwa supervisi berpengaruh positif-signifikan terhadap kaberlangsungan keuangan mikro. Asyraf Wajdi Dusuki (2010) berpendapat bahwa diperlukan pendekatan khusus dalam pengelolaan keuangan syariah, seperti penguatas kapasitas SDM.

Hubungan Kapasitas Lembaga dengan Eksistensi BMT/BTM

Aspek pengelolaan yang mencakup dukungan sumber daya manusia (SDM), pelayanan, dan produk inovatif berpengaruh terhadap keberlangsungan keuangan mikro (Siebel, 1999). Qayyum and Ahmad (2006) berpendapat bahwa keuangan mikro akan berjalan dengan baik, bila ada 10.000 peminjam (nasabah) aktif. Secara simultan, dengan faktor lain kapasitas lembaga berpengaruh terhadap keberlangsungan lembaga keuangan mikro (Abdul Salam, 2007).

Hubungan Kondisi Makro Ekonomi dengan Eksistensi BMT/BTM

Eksistensi lembaga keuangan mikro sangat dipengaruhi oleh kondisi makro sebuah negara. Hasil penelitian Asian Development Bank (2000) menunjukkan bahwa stabilitas kondisi makro ekonomi akan berdampak pada pengembangan lembaga keuangan mikro. Kazunari Tsukada, Takayuki Higashikata, dan Kazushi Takashashi (2010) dengan topik "Microfinance Penetration and its Influence on Credit Choice in Indonesia: Evidence from A Household Panel Survey" menemukan bahwa kredit keuangan dipengaruhi oleh kondisi makro ekonomi.

4. Hipotesis Penelitian

Berdasar pada uraian teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis bahwa regulasi, supervisi, kapasitas lembaga, dan kondisi makro ekonomi secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap eksistensi BMT/BTM di Pekalongan.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pekalongan yang meliputi kota dan kabupaten. Dua wilayah ini sengaja digabunglan karena hampir memiliki kharakteristik yang sama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data dikumpulkan dengan kuesioner (angket). Kuesioner diisi oleh jajaran pimpinan BMT yang



mengetahui persoalan BMT/BTM dan penelitian. Data dianalisis secara regresi dengan menggunakan bantuan program SPSS v. 16.0 (Ghazali, 2012).

Pada setiap BMT/BTM disebar dua kuesioner dengan puncuk pimpinan sebagai pengisi. Hal demikian dilakukan karena pucuk pimpinan dianggap sebagai orang yang memahami kondisi BMT/BTM. Dari hasil penyebaran kuisioner sebanyak 48 pada 24 KJKS/UJKS didapat 40 kuesioner kembali. Kuesioner yang tidak kembali adalah BMT Qurrota A'yun, BMT SMNU, BTM Wiradesa, dan BMT Kedungwuni, dengan alasan kesibukan laporan akhir tahun dan hubungan institusional yang kurang membaik. Dari 40 kuesioner diverifikasi keabsahanya menjadi 31. Kuesioner yang terindikasi disi dengan cara tidak serius dibuang, misalnya jawaban semua item sama pada semua variabel. Satu BMT dengan pola jawaban yang sama, maka hanya dipakai satu kuesioner saja, misalnya pada BMT al-Falah dan BMT Darul Mustakim, BMT Mina Lana, dan BMT Istiqlal.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Persamaan Regresi

Hasil uji regresi yang telah dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS 16.0 didapat hasil sebagai berikut.

Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Model Std. Error В Beta Τ Sig. (Constant) 23.787 5.682 4.186 .000 X1 .830 .406 2.021 .054 .411 X2 -.036-.600 -.011--.060-.952 X3 .139 .230 .124 .602 .552 X4 .261 .058 .015 .012 .954

Tabel. 1. Hasil Uji Regresi

Sumber: Data Diolah, 2014.

Dari hasil uji regresi diatas, diperoleh persamaan regresi Y = 23.787 + 0,406 $X_1 + -0,11$ $X_2 + 0,124$ $X_3 + 0,058$ X_4 . Dari persamaan tersebut dijelaskan bahwa apabila tidak ada variabel regulasi, supervisi, kapasitas lembaga, dan kondisi makro ekonomi, terdapat nilai konstanta eksistensi BMT/BTM sebesar 23.787. Koefisien regresi regulasi positif adalah 0,406 yang berarti bahwa jika regulasi ditingkatkan, maka eksistensi BMT akan mengalami peningkatan sebesar 0,406. Koefisien regresi supervisi negatif adalah -0,11 yang berarti jika supervisi ditingkatkan, maka eksistensi BMT/BMT tidak akan mengalami peningkatan, justru akan menurun sebesar -0,11. Koefisien regresi kapasitas lembaga positif sebesar 0,124, yang

berarti jika kapasitas lembaga ditingkatkan, maka eksistensi BMT/BTM akan mengalami peningkatan sebesar 0,124. Koefisien regresi kondisi makro ekonomi positif adalah 0,058, yang berarti jika kondisi makro ekonomi ditingkatkan, maka keberlangsungan BMT/BTM akan mengalami peningkatan sebesar 0,058.

2. Hasil Uji F (Model)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Derajat kepercayaan yang digunakan adalah 0,05. Apabila nilai F hasil perhitungan lebih besar daripada nilai F menurut tabel maka hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dari hasil uji F diperoleh hasil sebagai berikut.

Sum of Mean Model Df F Squares Sig. Square 1.813 Regression .157° 58.171 4 14.543 Residual 8.023 208.603 26 Total 266.774 30

Tabel 2. Hasil Uji Model (F)

Sumber: Data Diolah, 2014.

Dari hasil uji F diatas, maka dihasilkan nilai 1,813 dengan signifikansi sebesar 0,157 (diatas 0,05). Hal ini berarti bahwa seluruh variabel independen (regulasi, supervisi, kapasistas lembaga, kondisi makro ekonomi) tidak berpengaruh secara bersama-sama terhadap eksistensi BMT/BTM. Oleh karena itu, model ini tidak cukup ideal untuk dijadikan model penelitian.

3. Hasil Uji t

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Dari pengujian pengaruh regulasi terhadap eksistensi, diperoleh nilai t_{hitung} dari variabel regulasi (X_1) sebesar 0,406 dengan nilai profitabilitas signifikansi sebesar 0,054 jauh diatas 0,05 (taraf nyata 5%) maka hipotesis yang menyatakan bahwa regulasi berpengaruh terhadap eksistensi BMT/BTM tidak dapat diterima (ditolak).

Penghitungan pengaruh supervisi terhadap eksistensi, diperoleh nilai t_{hitung} dari variabel supervisi (X_2) sebesar -0,011 dengan nilai profitabilitas signifikansi sebesar 0,952 jauh diatas 0,05 (taraf nyata 5%). Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa supervisi berpengaruh terhadap kebelangsungan BMT tidak dapat diterima (ditolak).

Dari penghitungan pengaruh kapasitas lembaga terhadap eksistensi, diperoleh nilai t_{hitung} dari variabel kapasitas lembaga (X_3) sebesar 0,124 dengan nilai profitabilitas signifikansi sebesar 0,552 jauh diatas 0,05 (taraf nyata 5%). Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa kapasitas lembaga berpengaruh terhadap kebelangsungan BMT tidak dapat diterima (ditolak).

Dari penghitungan pengaruh kondisi makro terhadap eksistensi, diperoleh nilai t_{hitung} dari variabel kondisi makro ekonomi (X_4) sebesar 0,012 dengan nilai profitabilitas signifikansi sebesar 0,954 jauh diatas 0,05 (taraf nyata 5%). Oleh karena itu hipotesis yang menyatakan bahwa kondisi makro ekonomi berpengaruh terhadap kebelangsungan BMT tidak dapat diterima (ditolak).

4. Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi pada regresi linear sering diartikan sebagai seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel terikatnya. Secara sederhana koefisien determinasi dihitung dengan mengkuadratkan Koefisien Korelasi (R). Dari hasil penghitungan diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 3. Koefisien Determinasi

			Adjusted R	Std. Error of	Durbin-
Model	R	R Square	Square	the Estimate	Watson
1	.467ª	.218	.098	2.83253	1.591

Sumber: Data Diolah, 2014.

Dari perhitungan diatas diperoleh hasil sebesar 0,098 atau 9,8%. Faktor regulasi, supervisi, kapasitas lembaga, dan kondisi makro ekonomi berpengaruh terhadap eksistensi BMT/BTM, namun kecil. Sisanya 90,2 % dipengaruhi faktor lain di luar dari penelitian ini.

5. Pembahasan

Regulasi memberi kerangka acuan dalam pengoperasian BMT/BTM. Regulasi yang jelas, akan memberi kepastian hukum bagi institusi dan juga masyarakat sebagai pengguna (konsumen). Dalam penelitian, faktor regulasi memiliki nilai sebesar 0,406 dengan nilai profitabilitas signifikansi sebesar 0,054 jauh diatas 0,05 (taraf nyata 5%), maka regulasi tidak berpengaruh terhadap kebelangsungan BMT. Hasil ini bertentangan dengan pendapat Staschen (1999) yang melihat bahwa regulasi diperlukan untuk menjamin bahwa operasionalisasi lembaga keuangan mikro dapat berjalan lancar, sehingga akan menguntungkan kedua belah pihak. Sementara, Bank Indonesia (2000) memandang bahwa pentingnya regulasi lembaga keuangan mikro adalah untuk melindungi nasabah dan menghindari moral hazard karena adanya perbedaan kepentingan antara nasabah dan lembaga keuangan mikro. Abdul Salam (2007) juga berpendapat bahwa regulasi berpengaruh positif-signifikan terhadap kaberlangsungan keuangan mikro. Penelitian yang dilakukan oleh Jay K. Rosengard't dan A. Prasetyantoko (2011) menyimpulkan bahwa pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang tepat.

Supervisi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa institusi mematuhi regulasi yang ditetapkan. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa

supervisi yang dilakukan Dekopin dan DPS sebesar -0,011 dengan nilai profitabilitas signifikansi sebesar 0,952 jauh diatas 0,05 (taraf nyata 5%). Dengan demikian, bahwa supervisi tidak berpengaruh terhadap kebelangsungan BMT. Kesimpulan ini, tentu berbeda dengan pendapat Staschen (1999), bahwa supervisi diperlukan untuk menjamin bahwa operasionalisasi lembaga keuangan mikro dapat berjalan lancar, sehingga akan menguntungkan kedua belah pihak. Sementara, Bank Indonesia dan GTZ (2000) memandang bahwa pentingnya supervisi lembaga keuangan mikro untuk melindungi nasabah dan menghindari kepentingan antara nasabah dan lembaga. Hubungan ini juga didukung oleh Abdul Salam (2007) yang berpendapat bahwa supervisi berpengaruh positif-signifikan terhadap kaberlangsungan keuangan mikro. Asyraf Wajdi Dusuki (2010) berpendapat bahwa diperlukan pendekatan khusus dalam pengelolaan keuangan syariah, seperti penguatas kapasitas SDM.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas lembaga yang terdiri dari SDM, kantor cabang, modal, dan sebagainya memiliki nilai sebesar 0,124 dengan nilai profitabilitas signifikansi sebesar 0,552 jauh diatas 0,05 (taraf nyata 5%). Artinya bahwa bahwa kapasitas lembaga tidak berpengaruh terhadap kebelangsungan BMT. Aspek pengelolaan yang mencakup dukungan Sumber Daya Manusia (SDM), pelayanan, dan produk inovatif berpengaruh terhadap keberlangsungan keuangan mikro (Siebel, 1999). Qayyum and Ahmad (2006) berpendapat bahwa keuangan mikro akan berjalan dengan baik bila ada 10.000 peminjam (nasabah) aktif. Secara simultan, dengan faktor lain kapasitas kelembagaan berpengaruh terhadap keberlangsungan lembaga keuangan mikro (Abdul Salam, 2007). Hasil penelitian Lanny Octavia (Januari 2002-Juni 2004), dari hasil pengujian secara statistik membuktikan bahwa pertumbuhan modal adalah variabel determinan utama pada pertumbuhan tingkat kesehatan BMT At-Taqwa Kemanggisan Jakarta.

Nilai signifikansi kondisi makro ekonomi sebesar 0,012 dengan nilai profitabilitas signifikansi sebesar 0,954 jauh diatas 0,05 (taraf nyata 5%). Dengan demikian, kondisi makro ekonomi berpengaruh terhadap eksistensi BMT/BTM tetapi tidak signifikan. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Asian Development Bank (2000) dan Kazunari Tsukada, dkk (2010). Dari hasil penelitian ADB menunjukkan bahwa stabilitas kondisi makro ekonomi berdampak pada pengembangan lembaga keuangan mikro. Kazunari Tsukada, Takayuki Higashikata, dan Kazushi Takashashi dengan topik "Microfinance Penetration and its Influence on Credit Choice in Indonesia: Evidence from A Household Panel Survey" menemukan bahwa kredit keuangan dipengaruhi oleh kondisi makro ekonomi.

E. Penutup

Simpulan

Berdasarkan pada uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka penelitian ini disimpulkan sebagai berikut. *Pertama*, dari hasil uji F, dihasilkan angka 1,813



dengan signifikansi 0,157 (diatas 0,05) yang berarti bahwa regulasi, supervisi, kapasistas lembaga, dan juga kondisi makro ekonomi mempengaruhi posistif eksistensi (keberlangsungan) BMT/BTM di Pekalongan secara bersama-sama, tetapi tidak signifikan. Dengan kata lain, penelitian ini tidak tidak bisa dijadikan model penelitian yang ideal untuk menjadi pengukur eksistensi BMT/BTM.

Dari hasil uji t menunjukkan bahwa variabel regulasi, kapasistas lembaga, dan kondisi makro ekonomi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap eksistensi BMT/BTM di Pekalongan, karena signifikansinya diatas 0,05. Justru, faktor supervisi berpengaruh negatif terhadap eksistensi BMT/BTM di Pekalongan. Artinya, jika supervisi yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan pihak yang berwenang terkait ditingkatkan akan menurunkan eksistensi BMT/BTM.

Keterbatasan

Ada beberapa keterbatasan yang dijumpai dalam penelitian ini, diantaranya, pertama, ada kuesioner yang diisi oleh responden, yaitu bagian bawahan bukan pucuk pimpinan, padahal sasaran penelitian ini adalah pucuk pimpinan. Kedua, kuesioner diisi dengan tidak seksama sehingga terkesan tidak serius, karena kesibukan kerja. Ketiga, penelitian ini tidak membuat kriteria secara jelas mengenai BMT/BTM yang diteliti, misal lama berdiri atau bahkan jumlah dana kelolaan yang dimiliki.

Saran

Berdasar pada kesimpulan dan keterbatasan penelitian, maka disarankan Bagi peneliti berikutnya. Penelitian ini bisa dikatakan sebagai penelitian rintisan, oleh karena itu perlu dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti berikutnya dengan membandingkan daerah lain, dengan tetap menggunakan variabel yang sama atau bahkan menambah beberapa variabel.



Daftar Pustaka

- Arsyad, Lincolin. 2005. An Assesment of Performance and Sustainability of Microfinance Institution: A Case Study of Village Credit Institution in Gianyar, Bali. Adelaide: Faculty of Social Sciences, Flinders University Adelaide.
- Asian Development Bank. 2000. Finance for the Poor: Microfinance Development Strategy. Manila: ADB.
- Bank Indonesia. 2000. Model Sistem Deteksi Dini BPR. Jakarta: Bank Indonesia.
- Dusuki, Asyraf Wajdi. 2009. "Banking for the Poor: the Role of Islamic Banking in Microfinance Initiative". Kuala Lumpur: ISRA.
- Galor, Oded. 2005. From Stagnation to Growth: Unied Growth Theory." In Handbook of Economic Growth, Vol IA, ed. Philippe Aghion and Steven N. Durlauf, 171{293. Amsterdam, The Netherlands:Elsevier North-Holland.
- Ghazali, Imam dan Fuad. 2012. Structural Equation Modeling: Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan Program Lisrel 8.80. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Hafidz, MS., Kuat Ismanto, Marlina. 2001. *Manajemen Risiko BMT di Kota Pekalongan.* laporan penelitian tidak diterbitkan. Bappeda Kota Pekalongan.
- http://www.republika.co.id diunduh 20 September 2014.
- Imaniyati, Neni Sri. 2010. Aspek-Aspek Hukum BMT. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Jeanny Mareta Daud, Agus Hendrawan, Retno Aulia Vinarti, Pembuatan Strategic Dashboard untuk Mengidentifikasi dan Mengukur Potensi Tingkat Kesehatan Lembaga Keuangan Syariah Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) dengan Metode PEARLS Studi Kasus APEX. JURNAL TEKNIK ITS Vol. 1, No. 1(Sept. 2012) ISSN: 2301-9271. (20 Juli 2014)
- Kazunari Tsukada, Takayuki Higashikata, dan Kazushi Takashashi. 2010. "Microfinance Penetration and its Influence on Credit Choice in Indonesia: Evidence from A Household Panel Survey" dalam The Devoloping Economies 48, No. 1 (March 2010): 102-127.
- Makshum, Hafidz., Kuat Ismanto, Marlina. 2011. Manajemen Risiko BMT (Studi Terhadap Manajemen Risiko BMT-BMT di Kota Pekalongan). *Laporan Penelitian*. Tidak Diterbitkan. Bappeda Kota Pekalongan.
- Martowijoyo, Sumantoro. 2001. Dampak Pemberlakuan Sistem Bank Perkreditan Rakyat terhadap Kinerja Lembaga Keuangan Pedesaan. Yogyakarta: Disertasi Doktor UGM.
- Morshed, SJ Turnovsky. 2004. <u>Sectoral Adjustment Costs And Real Exchange Rate</u>

 <u>Dynamics In A Two-Sector Dependent Economy</u>. Journal of International



- Economics. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ (diunduh, 2 Maret 2014).
- Nanga, Muana. 2001. Makro Ekonomi, Edisi 1. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Octavia, Lany. 2004. Analisis Determinan Pertumbuhan Tingkat Kesehatan BMT: Studi Kasus pada BMT at-Taqwa Kemanggisan. *Tesis Tidak Diterbitkan.* Jakarta: Univesitas Indonesia. http://lontar.ui.ac.id/opac/ui/detail.jsp?id=94789&lokasi=lokal (20 Juli 2014).
- Qayyum, A., & Ahmad, M. 2006. Efficiency and Sustainability Of Micro Finance. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/11674/.
- Qayyum, Abdul dan Munir Ahmad. 2006. "Efficiency and Sustainability of Micro Finance Institutions in South Asia.
- Rosengard't, Jay K. dan A. Prasetyantoko. 2011. "If The Banks are Doing so Well, Why Can not I Get a Loan? Regulatory Constraints to Financial Inclusion in Indonesia" dalam Asian Economic Policy Review 6, (2011): 273-296.
- Salam, Abdul. 2007
- . Sustainabilitas Lembaga Keuangan Mikro Koperasi Simpan Pinjam. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- Siebel, Hans Dieter. 1999. Guidelines for Microfinance Viability: taken from Microfinance for the Poor. Cologne: Working Paper, University of Cologne.
- Staschen, Stefan. 1999. Regulation and Supervision of Microfinance Institutions: State of Knowledge. Eschborn: GTZ.
- www.bisniskeuangan.kompas.com diakses pada tanggal 1 Desember 2013.

